

**DAFTAR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI  
KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2022**

NO	No.Reg	Pemohon/Objek Permohonan	Termohon	Amar Putusan	KET/Putusan
1	001/II/KIProv-LPG-PS/2022	DPC PWRI Lampung Barat	Dinas Pendidikan Lampung Barat	-----	Pembatalan Registrasi
2	002/II/KIProv-LPG-PS/2022 09 Februari 2022	Fathurahman Al-Hamid/ 1. Bupati dan atau Pemerintah Kabupaten Tanggamus memberikan informasi dan klarifikasi terhadap Tanah yang berlokasi di Way Som, Desa Kota Agung, Kec Kota Agung, Tanggamus yang saat ini telah dibangun kantor Pemda Tanggamus. 2. Menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik dan musyawarah 3. Memberikan klarifikasi tersebut di atas melalui kami sebagaimana domisili hukum kami selaku Kuasa Hukum. 4. Apabila tidak ada itikad baik ( <i>good faith</i> ) untuk menyelesaikan permasalahan ini, kami akan menempuh jalur hukum yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.	Bupati Kabupaten Tanggamus	Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan Temohon memberikan informasi status kepemilikan tanah atas aset bangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang terdiri dari gedung GOR Ratu Tanggamus dan Pusat Kesehatan Hewandi Way Som Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Tanggamus.	Putusan Akhir
3	003/IV /KIProv-LPG-PS/2022	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) 1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran	Kepala Desa Rantau Jaya Banjit, Way Kanan	1. <b>Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian</b>	Putusan Sela

	07 April 2022	<p>Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021</p> <p>2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 disertai dengan :</p> <p>a. Laporan Keuangan, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan realisasi APB Desa; dan</li> <li>2. Catatan atas laporan keuangan.</li> </ol> <p>b. Laporan realisasi kegiatan; dan</p> <p>c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021</p> <p>3. Daftar inventaris asset-aset Desa</p> <p>4. Laporan penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan Dan Pencegahan Virus Covid-19 yaitu Dana BLT Dana Desa Tahun 2020</p> <p>a. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana kegiatan dan Anggaran Desa</li> <li>2. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan</li> <li>3. Rencana Anggaran Biaya</li> </ol> <p>b. Daftar Penerima Bantuan</p> <p>c. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)</p> <p>5. Laporan penggunaan Dana Bantuan</p>		<p><b>Sengketa Informasi Publik tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.</b></p>	
--	---------------	--	--	---	--

		<p>Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid-19 yang bersumber dari APBD dan Sumber lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar sumber Anggaran dan Jumlah Anggaran</li> <li>Rencana kegiatan</li> <li>Rencana anggaran biaya</li> <li>Daftar Penerima Bantuan</li> <li>Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)</li> </ol>			
4	<p>004/IV /KIProv-LPG-PS/2022 11 April 2022</p>	<p>Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021</li> <li>Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 disertai dengan : Laporan Keuangan, terdiri atas : Laporan realisasi APB Desa; dan <ol style="list-style-type: none"> <li>Catatan atas laporan keuangan.</li> <li>Laporan realisasi kegiatan; dan</li> <li>Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021</li> </ol> </li> <li>Daftar inventaris asset-aset Desa</li> <li>Laporan penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan Dan Pencegahan Virus Covid-19 yaitu Dana BLT Dana Desa Tahun 2020</li> </ol>	<p>Kepala Desa Sai Umpu Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan</p>	<p>1. <b>Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.</b></p>	Putusan Sela

		<p>d. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas :</p> <p>5. Rencana kegiatan dan Anggaran Desa</p> <p>4. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan</p> <p>5. Rencana Anggaran Biaya</p> <p>e. Daftar Penerima Bantuan</p> <p>f. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)</p> <p>6. Laporan penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid-19 yang bersumber dari APBD dan Sumber lainnya.</p> <p>f. Daftar sumber Anggaran dan Jumlah Anggaran</p> <p>g. Rencana kegiatan</p> <p>h. Rencana anggaran biaya</p> <p>i. Daftar Penerima Bantuan</p> <p>j. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)</p>			
5	005/IV /KIProv-LPG-PS/2022 27 April 2022	<p>DPC PWRI Lampung Barat</p> <p><b>1. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak–Suoh Kabupaten Lampung Barat Tahun Angaraan 2020.</b></p> <p><b>2. Laporan Realisasi Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak–Suoh Kabupaten Lampung Barat Tahun Angaraan 2020.</b></p>	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung	<p><b>[6.1]</b> Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.</p> <p><b>[6.2]</b> menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa:</p> <p>1. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Ruas</p>	Putusan Akhir

		<p>3. Dokumen Desain Gambar Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak–Suoh Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.</p> <p>4. Dokumen Kontrak Tender Pihak ke 3 Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak–Suoh Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.</p>		<p>Jalan Pekon Balak–Suoh Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.</p> <p>2. Laporan Realisasi Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak–Suoh Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.</p> <p>3. Dokumen Desain Gambar Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak–Suoh Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.</p> <p>merupakan Informasi Publik Terbuka (bersifat aktif) yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Termohon.</p> <p><b>[6.3]</b> Menolak Permohonan Pemohon atas Dokumen Kontrak Tender Pihak ke-3 Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak–Suoh Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 karena Pemohon tidak memiliki kepentingan langsung dan bukan Badan Hukum yang bergerak dibidang jasa konstruksi sebagai peserta tender proyek <i>a quo</i>.</p>	
--	--	---	--	---	--

				<p><b>[6.4]</b> Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan dokumen Informasi sebagaimana dimaksud paragraf <b>[6.2]</b> kepada Pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan ini diterima oleh Termohon.</p> <p><b>[6.5]</b> Membebankan biaya penggandaan sebagaimana dimaksud paragraf <b>[6.4]</b> kepada Pemohon.</p>	
6	006/VI/KIProv-LPG-PS/2022 07 Juni 2022	DPC PWRI Lampung Barat <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020.</li> <li>2. Laporan Realisasi Anggaran Covid-19 Tahun 2019 dan Tahun 2020.</li> <li>3. Laporan Inventaris Pekon Tahun Anggaran 2019 dan 2020.</li> </ul>	Kepala Pekon Sukaraja Kec.Way Tenong Kabupaten Lampung Barat	1. <b>Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi</b>	Putusan Sela

				<b>No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.</b>	
7	007/VII/KIProv- LPG-PS/2022 29 Juli 2022	Sunardi, Suyut, Jaelani DKK  salinan informasi warkah : a. SHM Nomor 00021 seluas 11.390 m <sup>2</sup> b. SHM Nomor 00022 seluas 18.930 m <sup>2</sup> c. SHM Nomor 00023 seluas 12.230 m <sup>2</sup> d. SHM Nomor 00024 seluas 16.270 m <sup>2</sup> e. SHM Nomor 00025 seluas 16.630 m <sup>2</sup> f. SHM Nomor 00026 seluas 23.750 m <sup>2</sup>	Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan	Dalam Proses	Proses

<b>Nomor</b>	<b>Nama</b>	<b>Ketua</b>	<b>Anggota</b>	<b>Mediator</b>
1	Syamsurrizal, SH.,MM			
2	Ir. Ahmad Alwi Siregar			
3	Erizal, S.Ag., Mediator			
4	Muhammad Fuad, S.Ag.,M.H.,Mediator			
5	Dery Hendryan, S.I.P.,S.H.,MH,			
	<b>Jumlah</b>			